

# **RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024**

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BALANGAN**



## **KATA PENGANTAR**

Kami mengawali hasil penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Balangan Tahun 2024 dengan ungkapan syukur ke hadirat Allah SWT, dengan harapan agar kinerja BKPSDM Kabupaten Balangan dapat tercapai sesuai rencana yang dalam penyusunannya telah memedomani ketentuan tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur serta program dan kegiatan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 serta hasil pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021.

Renja ini merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen perencanaan pembangunan, baik tingkat perangkat daerah maupun pemerintah daerah. Renja tersebut juga merupakan turunan dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 yang dalam proses perumusan/penyusunannya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026.

Kami telah mengoptimalkan seluruh kemampuan untuk menyajikan Renja Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Balangan Tahun 2024 sebaik mungkin. Namun dikarenakan keterbatasan dalam berbagai hal, kami menyadari bahwa dokumen tersebut masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, masukan, dan saran perbaikan dari semua pihak sangat diharapkan dalam rangka perbaikan dokumen di masa mendatang. Semoga Renja yang disusun bermanfaat dan berkontribusi terhadap upaya perbaikan berkelanjutan pada BKPSDM Kabupaten Balangan.

Terakhir kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Renja Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Balangan dan tidak dapat disebutkan satu per satu, tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada pihak-pihak dimaksud. Semoga kerja sama yang terbangun dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan.

Paringin, Agustus 2023

Kepala Badan,



**H. SUFRIANNOR, S.Sos, M.AP**

Pembina Utama Muda

NIP. 19681012 198903 1 009

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum.....	2
C. Maksud dan Tujuan.....	3
D. Sistematika Penyusunan.....	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	6
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	6
C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	29
D. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	30
E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	38
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	39
A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	39
B. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	41
C. Program dan Kegiatan.....	42
D. Analisis Sosial Ekonomi.....	42
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	44
A. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	44
B. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.....	45
BAB V PENUTUP.....	55

## DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

No.	Judul Tabel/Gambar	Halaman
2.1.	Pengukuran Capaian Tujuan SKPD pada BKPSDM Kabupaten Balangan s.d. Tahun 2022	7
2.2.	Pengukuran Capaian Sasaran Strategis SKPD pada BKPSDM Kabupaten Balangan s.d. Tahun 2022	7
2.3.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022 BKPSDM Kabupaten Balangan	11
2.4.	Evaluasi Hasil Identifikasi dan Analisis Faktor Pendorong dan Penghambat Prioritas Kabupaten Balangan Tahun 2022 serta Tindak Lanjut pada Tahun 2023	21
2.5.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Balangan	25
2.6.	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 BKPSDM Kabupaten Balangan	32
2.7.	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 BKPSDM Kabupaten Balangan	38
3.1.	Peta Strategi Badan Kepegawaian Negara Tahun 2020-2024	40
3.1.	Rencana Kinerja Tujuan dan Sasaran SKPD pada BKPSDM Kabupaten Balangan Tahun 2024	42
4.1.	Matriks Renja Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Balangan Tahun 2024	50

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang telah dijabarkan secara teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah menyatakan bahwa penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu tahap yang harus dilakukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan melalui pengkajian kondisi riil dan empiris BKPSDM Kabupaten Balangan, evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap capaian Renstra Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Balangan.

#### **A. Latar Belakang**

Renja Perangkat Daerah mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena dokumen tersebut menterjemahkan perencanaan jangka menengah (RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah) ke dalam rencana, program, dan kegiatan tahunan serta langkah-langkah yang lebih konkret dan terukur. Sehingga Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Dokumen Renja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan. Sehingga penyusunan Renja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan perangkat daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan,

mengendalikan, dan mengevaluasi capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai tugas dan fungsi organisasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu: persiapan penyusunan, penyusunan rancangan, dan penetapan Renja Perangkat Daerah. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Renja Perangkat Daerah, orientasi mengenai RKPD dan Renja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi.

## **B. Landasan Hukum**

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Evaluasi dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Balangan Tahun 2013-2032;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Bupati Balangan Nomor 70 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
15. Peraturan Bupati Balangan Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

### **C. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Renja Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Balangan Tahun 2024 adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2022 dan reuiu pelaksanaan program, kegiatan, dan sub

kegiatan tahun 2023 yang selanjutnya akan dijadikan acuan untuk menyusun perencanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD BKPSDM Kabupaten Balangan Tahun 2024.

Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai acuan bagi pelaksanaan program, kegiatan, dan kegiatan secara konkret dan terukur selama kurun waktu satu tahun rencana.

#### **D. Sistematika Penyusunan**

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

##### **BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- D. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

##### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- B. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- C. Program dan Kegiatan

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

A. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

B. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

**BAB V PENUTUP**

Berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Tujuan BKPSDM Kabupaten Balangan yang dimuat dalam Renstra Tahun 2021-2026 adalah “Terwujudnya Profesionalitas Aparatus Sipil Negara (ASN)”, dengan indikator “Indeks Profesionalitas ASN”. Indeks tersebut digunakan untuk mengetahui tingkat profesionalitas ASN yang menghasilkan peta/potret tentang tingkat profesionalitas ASN dengan menggunakan kriteria tertentu. Hasil pengukuran akan digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN serta penilaian Reformasi Birokrasi.

Terdapat 4 (empat) dimensi yang digunakan untuk mengukur profesionalitas ASN, yaitu:

1. Kualifikasi; riwayat jenjang pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh pegawai, dengan bobot 25%.
2. Kompetensi; riwayat pengembangan kompetensi, dengan bobot 40%.
3. Kinerja; riwayat hasil penilaian kinerja yang mencakup Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja Pegawai (PKP), dengan bobot 30%.
4. Disiplin; data/informasi mengenai hukuman disiplin yang pernah diterima, dengan bobot 5%.

Capaian tujuan SKPD dalam kurun 2021 s.d. 2022 mengalami kenaikan, walaupun capaian target pada masing-masing tahun dimaksud masih belum sesuai harapan. Nilai Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan pada tahun 2021 adalah 45,71 atau 66,29% dari target yang ditetapkan sebesar 69. Nilai indeks tersebut meningkat menjadi 52,64 atau 70,19% pada tahun 2022, dari nilai target yang ditetapkan sebesar 75. Capaian tujuan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.  
Pengukuran Capaian Tujuan SKPD pada BKPSDM Kabupaten Balangan s.d.  
Tahun 2022

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target		Realisasi		Capaian (%)	
			2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Terwujudnya Profesionalitas Aparatus Sipil Negara (ASN)	Indeks Profesionalitas ASN	69,00	75,00	45,74	52,64	66,29	70,19

Hasil pengukuran capaian sasaran strategis BKPSDM Kabupaten Balangan pada tahun 2021 s.d. 2022 juga menunjukkan adanya peningkatan, bila diukur berdasarkan rata-rata capaian IKU. Rata-rata capaian pada tahun 2021 adalah 76,76% dan meningkat menjadi 91,56% pada tahun 2022. Adapun hasil pengukuran selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2.  
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis SKPD pada BKPSDM Kabupaten Balangan s.d.  
Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target		Realisasi		Capaian (%)	
			2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Optimalisasi tata kelola dan meningkatnya pelayanan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan	1.1. Indeks Implementasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN	45	50	Tidak rilis	63	-	126
		1.2. Indeks Sistem Merit	260	265	129	129	49,62	48,68
		1.3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Kepegawaian	85	90	88,31	90,01	103,89	100,01

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target		Realisasi		Capaian (%)	
			2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rata-rata Capaian IKU							76,76	91,56

Dapat dilihat berdasarkan tabel tersebut bahwa IKU Indeks Sistem Merit harus mendapatkan perhatian serius, karena realiasi/capaian kinerjanya masih jauh dari target yang ditetapkan. Realisasi IKU dimaksud pada tahun 2021 memperoleh nilai 129 atau hanya 49,62% dari target yang ditetapkan dengan nilai 260. Nilai tersebut merupakan hasil verifikasi Komisi ASN. Nilai 129 tersebut dapat dipertahankan pada tahun 2022, tetapi capaiannya menurun menjadi hanya 48,68%.

BKPSDM Kabupaten Balangan pada tahun 2022 merencanakan berbagai program, kegiatan, dan sub kegiatan yang ditekankan untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang di bidang manajemen ASN dan pengembangan SDM Aparatur melalui pendidikan dan pelatihan pegawai. Berdasarkan pengukuran kinerja yang dilakukan, sebagian besar pelaksanaan Renja sudah sesuai dengan jalur yang ditetapkan (*on the track*). Hal tersebut ditunjukkan dengan capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikator masing-masing pada tahun 2022 yang sebagian besar terealisasi 100%. Hasil pengukuran kinerja juga menunjukkan adanya program, kegiatan, dan sub kegiatan yang berhasil melampaui target yang direncanakan pada tahun tersebut.

Capaian indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota pada tahun 2021 yang evaluasinya dilakukan pada tahun 2022, yaitu Nilai Akuntabilitas SAKIP, dapat dicontohkan sebagai salah satu pelaksanaan Renja yang telah melampaui target. Indikator tersebut pada tahun 2022 hanya ditarget memperoleh nilai evaluasi sebesar 65 dengan predikat B (baik), tetapi dalam realisasinya mencapai nilai 75,79 dengan predikat BB (Sangat Baik). Indikator dimaksud pada tahun 2022 bahkan telah melampaui target akhir

periode Renstra pada tahun 2026. Target akhir indikator dimaksud pada tahun 2026 adalah memperoleh nilai evaluasi sebesar 72 dengan predikat BB (Sangat Baik), tetapi BKPSDM pada tahun 2022 telah memperoleh nilai sebesar 75,79 dengan predikat BB (Sangat Baik). Sehingga indikator tersebut sampai dengan tahun 2022 telah mencapai 106,75%.

Terdapat pula beberapa program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2022 yang belum optimal dan sesuai dengan target Renja. Hasil evaluasi beberapa indikator bahkan perlu mendapat perhatian khusus dari pimpinan. Adapun kegiatan dengan capaian kinerja di bawah 70% pada tahun 2022, yaitu:

1. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN dengan indikator Persentase pemenuhan pegawai berdasarkan ABK (69,69%). Penyebab utama rendahnya capaian kinerja tersebut adalah pengadaan ASN, baik melalui jalur PNS maupun PPPK, yang belum sebanding dengan kebutuhan. Pengadaan ASN didasarkan pada hasil persetujuan formasi Kementerian PAN dan RB terhadap usul yang disampaikan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah Kabupaten/Kota. Pemerintah Kabupaten Balangan mengusulkan formasi Calon ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 375 untuk memenuhi kebutuhan Tenaga Pendidikan, Kesehatan, dan Penyuluh Pertanian. Adapun formasi yang disetujui oleh Menteri PAN dan RB berdasarkan usulan tersebut adalah 371 formasi.
2. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN dengan indikator Persentase jabatan pimpinan tinggi, administrasi, fungsional yang terisi (38,33%). Adapun penyebab rendahnya capaian kinerja tersebut yaitu banyaknya formasi jabatan yang tidak terisi sesuai dengan Analisis Beban Kerja (ABK), terutama pada Jabatan Pelaksana dan Fungsional. Formasi Jabatan Pelaksana pada Pemerintah Kabupaten Balangan berjumlah 1.495 dan hanya terisi sebanyak 345 (23,06%). Adapun formasi Jabatan Fungsional ditetapkan sebanyak 4610 dan terisi sebanyak 1.583 (34,34%).

3. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN dengan indikator Persentase ASN yang memperoleh sertifikat kompetensi teknis dan fungsional (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) (50,20%). Rendahnya capaian kinerja disebabkan oleh masih banyaknya Pejabat Fungsional yang belum memenuhi kompetensi sesuai jenjang jabatan fungsional yang dipangkunya, khususnya bagi pejabat hasil penyetaraan Jabatan Pengawas ke dalam Jabatan Fungsional Ahli Muda. Hal tersebut dipengaruhi oleh terbatasnya penyelenggara pelatihan fungsional untuk pejabat hasil penyetaraan jabatan tersebut. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Balangan dapat menyelenggarakan pelatihan tersebut di daerah, sehingga dapat mengakselerasi pemenuhan kompetensi dimaksud.

Gambaran lengkap terkait evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (termasuk proyeksi capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 yang sedang berjalan) dan pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.3.**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan**  
**Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2023**  
**BKPSDM Kabupaten Balangan**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 s.d. 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5					<b>Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan</b>									
5	03				<b>Kepegawaian</b>									
5	03	01			<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) BKPSDM</b>	72	71	65	75,79	116,60	67	75,79	105,26
						<b>Persentase Aset dalam Kondisi Baik</b>	100%	95,33%	100,00%	95,33%	95,33	100%	100%	100
5	03	01	2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu</b>	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	48 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	100	8 dokumen	24 dokumen	50,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 s.d. 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 dokumen	-	4 dokumen	4 dokumen	100	4 dokumen	8 dokumen	40,00
5	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100	3 dokumen	9 dokumen	50,00
5	03	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 orang	36 orang	36 orang	36 orang	100	37 orang	37 orang	100
5	03	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4371 dokumen	255 dokumen	1116 dokumen	1116 dokumen	100	750 dokumen	2121 dokumen	49
5	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	25 laporan	-	5 laporan	5 laporan	100	5 laporan	10 laporan	40,00

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 s.d. 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	03	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum sesuai ketentuan yang berlaku</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	21 paket	-	5 paket	5 paket	100	4 paket	9 paket	42,86
5	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	28080 dokumen	4680 dokumen	4680 dokumen	4680 dokumen	100	4680 dokumen	14040 dokumen	50,00
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	478 laporan	11 laporan	107 laporan	107 laporan	100	90 laporan	208 laporan	43,51
5	03	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai RKBU</b>	<b>100%</b>	<b>50,00%</b>	-	-	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
5	03	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	26 unit	2 unit	-	-	-	7 unit	9 unit	34,62
5	03	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>72 bulan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>100</b>	<b>12 bulan</b>	<b>36 bulan</b>	<b>50,00</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 s.d. 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	36 laporan	50,00
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	36 laporan	50,00
5	03	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>72 bulan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>100</b>	<b>12 bulan</b>	<b>36 bulan</b>	<b>50,00</b>
5	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 unit	20 unit	20 unit	18 unit	90,00	20 unit	20 unit	100
5	03	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	-	1 unit	1 unit	100	1 unit	1 unit	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 s.d. 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	03	02			Program Kepegawaian Daerah	Persentase tata kelola dan pelayanan kepegawaian yang dilaksanakan sesuai sistem dan prosedur berlaku	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase pemenuhan pegawai berdasarkan ABK	70%	53,00%	55,00%	38,33%	69,69	60,00%	60,00%	85,71
						Persentase data kepegawaian yang mutakhir/terkini	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	6 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	3 dokumen	50,00
5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	6 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	3 dokumen	50,00
5	03	02	2.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	100,00	1 lembaga	1 lembaga	100
5	03	02	2.01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 dokumen	-	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	2 laporan	200

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 s.d. 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	03	02	2.02		<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>	<b>Persentase jabatan pimpinan tinggi, administrasi, fungsional yang terisi</b>	100%	53,00%	100%	38,33%	38,33	100%	100%	100
						<b>Persentase SK Kenaikan Pangkat yang terbit tiap periode</b>	100%	95,34%	100%	98,18%	98,18	100%	100%	100
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	6 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	3 dokumen	50,00
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	12 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	6 dokumen	50,00
5	03	02	2.03		<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>	<b>Persentase ASN yang memperoleh sertifikat kompetensi teknis dan fungsional (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)</b>	45,00%	62,11%	35,00%	17,57%	50,20	37,00%	37,00%	82,22
5	03	02	2.03	02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	6 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	3 dokumen	50,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 s.d. 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	03	02	2.03	03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	6 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	3 dokumen	50,00
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	32 orang	6 orang	4 orang	4 orang	100	5 orang	15 orang	46,88
5	03	02	2.03	06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	1438 orang	-	1219 orang	46 orang	3,77	54 orang	100 orang	6,95
5	03	02	2.03	10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN	980 orang	-	163 orang	12 orang	7,36	217 orang	229 orang	23,37
5	03	02	2.04		<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>Persentase ASN yang disiplin</b>	<b>100%</b>	<b>99,83%</b>	<b>100%</b>	<b>99,97%</b>	<b>99,97</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
						<b>Persentase penghargaan yang diberikan kepada pegawai yang memenuhi syarat</b>	<b>100%</b>	<b>74,18%</b>	<b>100%</b>	<b>74,05%</b>	<b>74,05</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
5	03	02	2.04	03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	6 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	3 laporan	50,00
5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	30 orang	-	-	-	-	6 orang	6 orang	20,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 s.d. 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	03	02	2.04	05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	1309 orang	-	309 orang	309 orang	100	200 orang	509 orang	38,88
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	6 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	3 laporan	50,00
5	03	02	2.04	09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	5 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	2 dokumen	40,00
5	04				<b>Pendidikan dan Pelatihan</b>									
5	04	02			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase pemenuhan dan peningkatan kompetensi SDM aparatur	100%	35,70%	66,00%	35,08%	53,15	69,00%	69,00%	69,00
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase pejabat pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas yang lulus sertifikasi kompetensi manajerial	100%	68,75%	100%	100%	100	100%	100%	100
						Persentase CPNS yang lulus Pelatihan Prajabatan/Pelatihan Dasar	100%	100%	100%	99,21%	99,21	100%	100%	100

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 s.d. 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	12 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100	2 laporan	6 laporan	50,00

Beberapa kebijakan/tindakan korektif yang disarankan dan dapat diambil untuk mengatasi permasalahan dan mengoptimalkan pencapaian target pelaksanaan Renja dan Renstra, berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (termasuk proyeksi tahun 2023 yang sedang berjalan) dan pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2022, adalah sebagai berikut:

1. Perlunya pengembangan kompetensi bagi SDM Aparatur yang dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Selain didasari alasan bahwa pengembangan kompetensi merupakan hak ASN sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, publik juga menuntut percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan. Tuntutan tersebut hanya dapat dilakukan oleh ASN yang kompeten.
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana BKPSDM Kabupaten Balangan yang berbasis pada kebutuhan dan skala prioritas. Terutama sarana dan prasarana kediklatan dengan tujuan jangka panjang dapat melaksanakan berbagai pengembangan kompetensi ASN di daerah, khususnya pelatihan dengan pola fasilitasi.
3. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pimpinan dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait di bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan.
4. Meningkatkan instensitas kerja sama di bidang pengembangan SDM (pendidikan dan pelatihan) dengan berbagai Lembaga Pelatihan Pemerintah

Terakreditasi. Hal tersebut harus dilakukan untuk mengentaskan masalah masih rendahnya tingkat kompetensi ASN Pemerintah Kabupaten Balangan.

BKPSDM juga telah melakukan evaluasi pelaksanaan Prioritas Kabupaten Balangan Tahun 2023 yang terkait langsung dengan tugas, fungsi, dan wewenang BKPSDM. Prioritas dimaksud, yaitu: “Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara”. Analisis dilakukan terhadap hal-hal yang menjadi pendorong dan penghambat prioritas tersebut. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa BKPSDM tidak menjadi satu-satunya SKPD pengampu/penanggung jawab sasaran-sasaran pada prioritas tersebut, sehingga sinergitas dan kolaborasi dengan SKPD lain di lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan menjadi suatu keharusan. Adapun faktor pendorong dan penghambat serta tindak lanjut yang akan dilakukan untuk memanfaatkan faktor pendorong dan mengatasi faktor penghambat Prioritas dan Sasaran Daerah Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4.  
Evaluasi Hasil Identifikasi dan Analisis Faktor Pendorong dan  
Penghambat Prioritas Kabupaten Balangan Tahun 2023  
serta Tindak Lanjut pada Tahun 2024

Prioritas Kabupaten Tahun 2022	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut
Prioritas 5 : Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara, dengan sasaran sebagai berikut :			

Prioritas Kabupaten Tahun 2022	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut
a. Optimalisasi fungsi dan peran ASN sebagai pelayan masyarakat melalui peningkatan profesionalisme ASN	<p>1. Amanat Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 bahwa PNS berhak memperoleh pengembangan kompetensi sebanyak 20 Jam Pelajaran (JP) setiap tahun</p> <p>2. Komitmen Kepala Daerah terhadap pengembangan SDM Aparatur yang diinterpretasikan pada dokumen Rencana Aksi Pengembangan SDM Aparatur Kabupaten Balangan Tahun 2022-2024</p> <p>3. Ketersediaan anggaran untuk pengembangan kompetensi yang diharapkan berkontribusi positif terhadap profesionalisme ASN. Dimana kompetensi merupakan salah satu dimensi dalam pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dengan bobot 40%</p> <p>4. Kerja sama bidang kediklatan dengan berbagai lembaga pelatihan, baik instansi pemerintahan maupun swasta.</p>	<p>1. Anggaran pengembangan kompetensi yang tersedia pada BKPSDM Kabupaten Balangan belum mampu memenuhi hak pengembangan kompetensi 20 JP setiap tahun bagi seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan</p> <p>2. Tidak semua pimpinan/pembuat keputusan pada SKPD yang mengetahui bahwa pengembangan kompetensi merupakan hak PNS serta memfasilitasi pemenuhan hak tersebut</p> <p>3. Masih kurangnya kesadaran (<i>awareness</i>) dan motivasi pada diri pegawai untuk mengikuti pengembangan kompetensi.</p>	<p>1. Memperbarui regulasi daerah terkait pengembangan kompetensi PNS, agar sesuai dengan perkembangan dan dinamika kontemporer di bidang pengembangan SDM aparatur</p> <p>2. Memperbaiki dan meningkatkan tata kelola pengembangan kompetensi PNS pada aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengembangan kompetensi pegawai</p> <p>3. Mendorong tiap SKPD untuk memfasilitasi pengembangan kompetensi bagi PNS di satuan kerjanya masing-masing, antara lain dengan mengalokasikan anggaran pelatihan/<i>bimtek/lokakarya (workshop)</i></p> <p>4. Meningkatkan motivasi pegawai untuk mengikuti pengembangan kompetensi PNS, antara lain dilakukan melalui perumusan kebijakan pemberian kompensasi finansial dan/atau nonfinansial bagi pegawai yang memenuhi kompetensi jabatan yang dipersyaratkan</p>
b. Peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat	<p>1. Amanat peraturan perundangan dan kebijakan Kepala Daerah dan Pejabat yang Berwenang (PyB) untuk menempatkan pegawai sesuai dengan prinsip sistem merit dan <i>the right man in the right place</i></p>	<p>1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Balangan, baik secara kuantitas atau jumlah pegawai maupun secara kualitas (misalnya: kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diharapkan)</p>	<p>1. Melaksanakan mutasi dan promosi serta penempatan pegawai dengan mengoptimalkan SDM aparatur yang tersedia</p> <p>2. Melaksanakan fasilitasi pengadaan ASN untuk memenuhi kebutuhan SDM Aparatur, baik dari jalur PNS maupun PPPK</p>

Prioritas Kabupaten Tahun 2022	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut
c. Implementasi penyederhanaan birokrasi kepada seluruh jabatan administrasi (eselon IV) di seluruh Perangkat Daerah	1. Ketersediaan anggaran untuk pengembangan kompetensi Pejabat Fungsional hasil Penyetaraan Jabatan Pengawas pada Pemerintah Kabupaten Balangan sebanyak 217 (dua ratus tujuh belas) orang.	1. Masih terdapat 21 (dua puluh satu) orang Pejabat Fungsional hasil Penyetaraan Jabatan Pengawas yang belum teranggarkan mengikuti pengembangan kompetensi.	1. Melaksanakan pengembangan kompetensi melalui Bimtek Gelombang III bagi Pejabat Fungsional hasil Penyetaraan Jabatan Pengawas yang direncanakan berjumlah sebanyak 72 (tujuh puluh dua) orang; dan 2. Mengusulkan penambahan alokasi anggaran kontribusi bimtek melalui mekanisme APBD Perubahan TA 2022 bagi 21 (dua puluh satu) orang Pejabat Fungsional yang belum teranggarkan pengembangan kompetensinya.

## B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan publik yang diberikan BKPSDM bersifat *segmented*, karena lebih banyak bersentuhan dengan aparatur/pegawai sebagai bagian kecil dari definisi publik secara umum. BKPSDM memberikan berbagai pelayanan kepegawaian dan pengembangan SDM kepada aparatur/pegawai. Hasil analisis terhadap realisasi kinerja pelayanan tersebut pada tahun 2021 menunjukkan sebagian besar mencapai target yang ditetapkan sebesar 100%. Indikator pelayanan Jumlah ASN yang direkomendasikan dalam diklat/pelatihan/bimbingan diklat teknis, tugas dan fungsi bahkan memperoleh capaian kinerja sebesar 179,5%. Salah satu penyebab tingginya capaian indikator dimaksud adalah antusiasme pegawai dalam mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis (bimtek) yang marak dilakukan secara daring (*online*) oleh berbagai instansi/lembaga, karena adanya berbagai pembatasan sosial yang diterapkan pemerintah akibat kondisi Pandemi Covid-19. Pelatihan dan bimtek secara daring tidak membutuhkan biaya yang relatif besar dan lebih fleksibel bagi pegawai.

Kinerja pelayanan yang rendah dan tidak mencapai target pada tahun 2021 adalah indikator Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan. Capaian indikator tersebut hanya 3,77% dari target 100%. Indikator

dengan capaian rendah lainnya adalah Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN. Target indikator tersebut pada tahun 2022 adalah 163 orang dan hanya terealisasi sebanyak 12 orang atau 7,36%. Bentuk layanan yang diberikan pada dua indikator tersebut adalah pemberian layanan fasilitasi pengembangan kompetensi manajerial, teknis, dan fungsional, baik fasilitasi yang bersifat finansial maupun administrasi (seperti pembuatan telaahan staf dan surat perintah penugasan). Penyebab rendahnya kinerja indikator dimaksud antara lain belum optimalnya peran dan fungsi BKPSDM dalam melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan pengelolaan pengembangan kompetensi pegawai baik secara teknis maupun administrasi. Penyebab lainnya adalah ketergantungan pada lembaga pelatihan pemerintah terakreditasi dan keterbatasan alokasi anggaran yang dapat diberdayagunakan untuk memenuhi pengembangan kompetensi seluruh pegawai pada Pemerintah Kabupaten Balangan.

Rincian target kinerja pelayanan BKPSDM pada tahun 2022 s.d. 2025 beserta pencapaian kinerja pelayanan tahun 2022 dan 2023 serta proyeksi capaian tahun 2024 dan 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.5.**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**  
**BKPSDM Kabupaten Balangan**

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023 <sup>*)</sup>	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	-	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Fasilitasi dilaksanakan mulai dari persiapan, pelaksanaan seleksi, serta evaluasi dan pelaporan
2	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	-	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Pelayanan diberikan kepada PNS yang akan memasuki masa pensiun, khususnya mencapai Batas Usia Pensiun (BUP). Pelayanan juga diberikan untuk pensiun sebab tidak cakap jasmani/rohani, janda/duda meninggal dunia aktif, anumerta, atas permintaan sendiri, dan karena mencalonkan diri
3	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	-	-	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	Fasilitasi yang diberikan berupa berbagai aktivitas dalam rangka perayaan HUT KORPRI, tali asih anggota yang memasuki purna tugas, santunan musibah anggota (kecelakaan, kebakaran), dan pemberian uang duka wafat

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023 <sup>*)</sup>	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	-	-	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	Bentuk pelayanan yang diberikan berupa pemutakhiran data ASN melalui aplikasi resmi kepegawaian
5	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	-	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Pelayanan yang diberikan berupa penyelenggaraan pelantikan dan administrasi mutasi pegawai
6	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	-	-	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	Pelayanan yang diberikan berupa fasilitasi kenaikan pangkat bagi PNS yang memenuhi syarat mulai dari sosialisasi dan penyiapan sistem, pengumpulan dan verifikasi berkas usulan, pengunggahan bukti fisik, dan penerbitan surat keputusan
7	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	-	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Pelayanan diberikan dalam bentuk pengikutsertaan PNS pada kegiatan asesmen yang menjadi rangkaian Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
8	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	-	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Rekomendasi diberikan dalam bentuk pelayanan administrasi Telaahan Staf dan Surat Perintah Tugas bagi ASN yang akan mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023 <sup>*)</sup>	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
9	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	-	-	4 orang	5 orang	5 orang	5 orang	6 orang	4 orang	5 orang	5 orang	Bantuan berupa beasiswa diberikan kepada ASN yang melaksanakan Tugas Belajar, khususnya Dokter Spesialis
10	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	-	-	1219 orang	54 orang	55 orang	55 orang	-	46 orang	55 orang	55 orang	Pelayanan yang diberikan berupa bantuan biaya kontribusi dalam rangka pengembangan kompetensi PNS jenis jabatan Administrasi
11	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN	-	-	163 orang	217 orang	200 orang	200 orang	-	12 orang	200 orang	200 orang	Pelayanan yang diberikan berupa bantuan biaya kontribusi dalam rangka pengembangan kompetensi PNS jenis jabatan Fungsional
12	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-	-	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	Pelayanan yang diberikan berupa sosialisasi, layanan konsultasi, <i>coaching clinic</i> , dan reviu terhadap Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) ASN
13	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	-	-	-	6 orang	6 orang	6 orang	-	-	6 orang	6 orang	Pelayanan yang diberikan berupa penghargaan ( <i>reward</i> ) bagi ASN yang berprestasi atau menunjukkan kinerja tinggi
14	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	-	-	309 orang	200 orang	200 orang	200 orang	-	309 orang	200 orang	200 orang	Pelayanan yang diberikan berupa fasilitasi pemberian Satya Lencana Karya Satya (SLKS) bagi ASN

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023 <sup>*)</sup>	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
15	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	-	-	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	Pelayanan yang diberikan berupa penyelenggaraan administrasi tindak lanjut atas laporan pelanggaran disiplin serta upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pencegahan pelanggaran disiplin
16	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	-	-	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	-	1 laporan	1 laporan	1 laporan	Pelayanan yang diberikan berupa penyelenggaraan administrasi tindak lanjut atas permohonan perceraian serta upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka penasihatan untuk meminimalisir perceraian ASN
17	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	-	-	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	Pelayanan diberikan dalam bentuk pengikutsertaan Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas pada Pelatihan Kepemimpinan serta Calon PNS pada Pelatihan Dasar/Prajabatan dan PPPK pada kegiatan Orientasi yang diselenggarakan lembaga pemerintah terakreditasi

Keterangan :

\*) Realisasi capaian kerja tahun 2023 masih bersifat proyeksi (sedang berjalan/*on going*)

### C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu paling penting dan mencuat di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan pada Pemerintah Kabupaten Balangan adalah masih belum optimalnya profesionalisme ASN, khususnya pada dimensi kompetensi aparatur. Salah satu tolok ukur yang dapat digunakan untuk melihat gambaran kualitas SDM Aparatur adalah Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP-ASN). Indeks tersebut menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan ASN dalam melakukan tugas jabatannya. Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019, komposisi persentase tiap dimensi dalam pengukuran IP-ASN adalah sebagai berikut:

1. Kualifikasi pendidikan (25%)
2. Kompetensi (40%)
3. Kinerja (30%)
4. Kedisiplinan (5%)

Jadi, kompetensi aparatur merupakan dimensi dengan persentase terbesar dalam pengukuran IP-ASN. Komposisi 40% dari dimensi kompetensi tersebut diuraikan lagi ke dalam subdimensi yang meliputi: Pelatihan Struktural atau Pelatihan Fungsional (15%), Pelatihan Teknis 20 JP (15%), dan Workshop, Seminar, dan sejenisnya (10%). Sehingga sudah seharusnya pemerintah daerah memberikan perhatian yang lebih serius terhadap pengembangan kompetensi SDM aparatur, jika memiliki komitmen terhadap peningkatan kualitas ASN yang tercermin melalui profesionalitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Adapun rentang (*range*) nilai dalam pengkategorian IP-ASN terbagi dalam sangat tinggi (91-100), tinggi (81-90), sedang (71-80), rendah (61-70), dan sangat rendah (di bawah 60). Berdasarkan hasil pengukuran, IP-ASN Kabupaten Balangan pada tahun 2019 adalah 62,35 dan mengalami peningkatan menjadi 67,05 pada tahun 2020. Sehingga dapat disimpulkan bahwa IP-ASN Kabupaten Balangan pada tahun 2019 dan 2020 masih termasuk dalam kategori "Rendah".

Hasil penilaian IP-ASN pada tahun 2021 mengalami penurunan dengan memperoleh hasil 45,74 dengan predikat “Sangat Rendah” dan sedikit mengalami peningkatan kembali (*rebound*) menjadi 52,21 pada tahun 2022, walaupun masih berada pada predikat yang sama “Sangat Rendah”.

Dimensi kompetensi menjadi salah satu kontributor utama yang menyebabkan belum optimalnya IP-ASN Kabupaten Balangan. Dimensi tersebut pada tahun 2019 s.d. 2021 memiliki capaian 19,75 (2019), 24,05 (2020), dan 8,42 (2021) dari sebesar proporsi maksimal sebesar 40 dalam pengukuran IP-ASN. Hal tersebut menjadi indikasi adanya permasalahan pengembangan kompetensi ASN yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Balangan.

#### **D. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Salah satu permasalahan yang mencuat dalam Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 adalah penataan sistem manajemen SDM-ASN belum optimal. Oleh karena itu, penataan sistem manajemen SDM-ASN ditetapkan menjadi salah satu isu strategis daerah dalam rangka optimalisasi 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi. Adapun

Tujuan dan sasaran BKPSDM bersinggungan dengan Misi Keempat dalam RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026, yaitu Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara, dengan tujuan Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan sasaran Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi. Adapun indikator sasaran tersebut adalah Nilai SAKIP, Opini BPK, Nilai EKPPD, Indeks Pelayanan Publik, dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan dan sasaran BKSPDM bukan pengampu utama indikator sasaran RPJMD Tahun 2021-2026. BKPSDM hanya menjadi salah satu SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan yang berkontribusi terhadap indikator Nilai SAKIP dan IKM. Oleh karena itu, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disusun BKPSDM diarahkan dalam rangka

pencapaian indikator Nilai SAKIP dan IKM. Review Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 menginventarisir 3 (tiga) program, 11 (sebelas) kegiatan, dan 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan serta dengan total kebutuhan dana sebesar Rp 17.630.920.470,00 (*tujuh belas miliar enam ratus tiga puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu empat ratus tujuh puluh rupiah*). Rincian review Rancangan Awal RKPD selengkapnya dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.6.  
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024  
BKPSDM Kabupaten Balangan

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)</b>	<b>69</b>	<b>6.479.834.070</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)</b>	<b>69</b>	<b>9.044.636.277</b>	
			<b>Persentase Pencatatan Pengelolaan Aset dalam Kondisi Baik</b>	<b>100%</b>				<b>Persentase Pencatatan Pengelolaan Aset dalam Kondisi Baik</b>	<b>100%</b>		
1.1.	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>92.505.600</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>108.940.500</b>	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	30.609.700	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	39.855.500	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 dokumen	30.609.700	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 dokumen	42.160.000	
1.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 dokumen	31.286.200	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 dokumen	26.925.000	
1.2.	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan berlaku</b>	<b>100%</b>	<b>5.020.421.292</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan berlaku</b>	<b>100%</b>	<b>6.430.804.077</b>	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.2.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Balangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 orang	4.927.306.862	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Balangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 orang	6.328.054.077	
1.2.2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	750 dokumen	66.003.180	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	750 dokumen	90.750.000	
1.2.3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 laporan	27.111.250	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 laporan	12.000.000	
1.3.	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum sesuai ketentuan berlaku</b>	<b>100%</b>	<b>386.020.528</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum sesuai ketentuan berlaku</b>	<b>100%</b>	<b>532.028.100</b>	
1.3.1.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Balangan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	86.162.900	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Balangan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	163.331.800	
1.3.2.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	4680 dokumen	31.547.628	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	36 dokumen	45.144.000	
1.3.3.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 laporan	268.310.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 laporan	323.552.300	
1.4.	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai RKBU</b>	<b>100%</b>	<b>322.053.800</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai RKBU</b>	<b>100%</b>	<b>1.102.351.100</b>	
1.4.1.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Balangan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 unit	322.053.800	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Balangan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 unit	1.102.351.100	
1.5.	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>445.278.400</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>577.050.900</b>	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.5.1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	150.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	212.928.200	
1.5.2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	295.278.400	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	364.122.700	
1.6.	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>213.554.450</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>293.461.600</b>	
1.6.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Balangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 unit	119.674.450	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Balangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 unit	169.461.600	
1.6.2.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Balangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	93.880.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Balangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	124.000.000	
2.	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>		<b>Persentase tata kelola dan layanan kepegawaian sesuai sistem dan prosedur berlaku</b>	<b>100%</b>	<b>8.049.411.400</b>	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>		<b>Persentase tata kelola dan layanan kepegawaian sesuai sistem dan prosedur berlaku</b>	<b>100%</b>	<b>9.046.360.300</b>	
2.1.	<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>		<b>Persentase pemenuhan pegawai berdasarkan ABK</b>	<b>65,00%</b>	<b>465.098.700</b>	<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>		<b>Persentase pemenuhan pegawai berdasarkan ABK</b>	<b>65,00%</b>	<b>486.949.900</b>	
			<b>Persentase data kepegawaian yang mutakhir/terkini</b>	<b>100%</b>				<b>Persentase data kepegawaian yang mutakhir/terkini</b>	<b>100%</b>		
2.1.1.	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 dokumen	170.919.000	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 dokumen	140.639.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.1.2.	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 dokumen	71.370.000	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 dokumen	74.726.000	
2.1.3.	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Kab. Balangan	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 lembaga	80.862.800	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Kab. Balangan	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 lembaga	90.379.400	
2.1.4.	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 laporan	141.946.900	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 laporan	181.205.500	
2.2.	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>		<b>Persentase jabatan pimpinan tinggi, administrasi, fungsional yang terisi</b>	<b>100%</b>	<b>223.976.600</b>	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>		<b>Persentase jabatan pimpinan tinggi, administrasi, fungsional yang terisi</b>	<b>100%</b>	<b>298.240.400</b>	
			<b>Persentase SK Kenaikan Pangkat yang terbit tiap periode</b>	<b>100%</b>				<b>Persentase SK Kenaikan Pangkat yang terbit tiap periode</b>	<b>100%</b>		
2.2.1.	Pengelolaan Mutasi ASN	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 dokumen	83.284.000	Pengelolaan Mutasi ASN	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 dokumen	91.828.600	
2.2.2.	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 dokumen	140.692.600	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 dokumen	206.411.800	
2.3.	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>		<b>Persentase ASN yang memperoleh sertifikat kompetensi teknis dan fungsional (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)</b>	<b>40,00%</b>	<b>6.888.021.100</b>	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>		<b>Persentase ASN yang memperoleh sertifikat kompetensi teknis dan fungsional (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)</b>	<b>40,00%</b>	<b>7.361.027.800</b>	
2.3.1.	Pengelolaan <i>Assessment Center</i>	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Pengelolaan <i>Assessment Center</i>	1 dokumen	305.638.900	Pengelolaan <i>Assessment Center</i>	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Pengelolaan <i>Assessment Center</i>	1 dokumen	1.693.829.900	
2.3.2.	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1 dokumen	4.246.056.000	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1 dokumen	2.496.055.600	
2.3.3.	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kab. Balangan	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	5 orang	454.163.000	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kab. Balangan	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	138 orang	1.538.980.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.3.4.	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Kab. Balangan	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	55 orang	370.760.800	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Kab. Balangan	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	55 orang	370.760.500	
2.3.5.	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Kab. Balangan	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN	200 orang	1.511.402.400	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Kab. Balangan	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN	200 orang	1.261.401.800	
2.4.	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>		<b>Persentase ASN yang disiplin</b>	<b>100%</b>	<b>472.315.000</b>	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>		<b>Persentase ASN yang disiplin</b>	<b>100%</b>	<b>900.142.200</b>	
			<b>Persentase penghargaan yang diberikan kepada pegawai yang memenuhi syarat</b>	<b>100%</b>				<b>Persentase penghargaan yang diberikan kepada pegawai yang memenuhi syarat</b>	<b>100%</b>		
2.4.1.	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 laporan	153.386.000	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 laporan	573.610.000	
2.4.2.	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Kab. Balangan	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	6 orang	158.235.600	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Kab. Balangan	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	6 orang	115.043.200	
2.4.3.	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Kab. Balangan	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	200 orang	66.811.400	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Kab. Balangan	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	200 orang	68.016.000	
2.4.4.	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 laporan	66.862.000	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 laporan	72.333.000	
2.4.5.	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	1 dokumen	27.020.000	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	1 dokumen	71.140.000	
3.	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>		<b>Persentase pemenuhan dan peningkatan kompetensi SDM aparatur</b>	<b>72,00%</b>	<b>3.101.675.000</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>		<b>Persentase pemenuhan dan peningkatan kompetensi SDM aparatur</b>	<b>72,00%</b>	<b>3.936.675.900</b>	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.1.	<b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>		<b>Persentase pejabat pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas yang lulus sertifikasi kompetensi manajerial/kepemimpinan</b>	<b>100%</b>	<b>3.101.675.000</b>	<b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>		<b>Persentase pejabat pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas yang lulus sertifikasi kompetensi manajerial/kepemimpinan</b>	<b>100%</b>	<b>3.936.675.900</b>	
			<b>Persentase CPNS yang lulus Pelatihan Prajabatan/Pelatihan Dasar</b>	<b>100%</b>				<b>Persentase CPNS yang lulus Pelatihan Prajabatan/Pelatihan Dasar</b>	<b>100%</b>		
3.1.1.	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2 laporan	3.101.675.000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2 laporan	3.936.675.900	

**E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Tujuan dan sasaran serta tugas dan fungsi BKPSDM Kabupaten Balangan tidak berkaitan/bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kelompok yang menjadi sasaran tugas dan fungsi BKPSDM adalah SDM Aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan. Di samping itu, implementasi tugas dan fungsi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan secara prinsip sudah diatur dalam berbagai kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Sehingga dalam proses penyusunan rencana pembangunan, BKPSDM tidak menghimpun usulan dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) atau forum sejenis sebagaimana dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, dan SKPD teknis lain yang *core business* atau tata kelola organisasinya terkait langsung dengan masyarakat.

Tabel 2.7.  
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024  
BKPSDM Kabupaten Balangan

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

**BAB III**  
**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

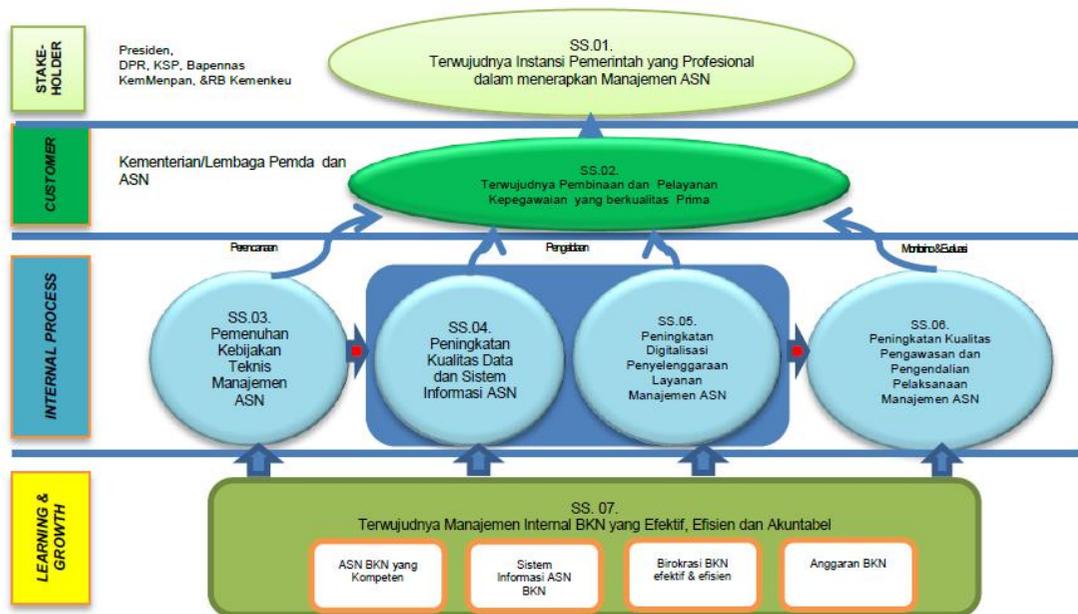
**A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Kebijakan kepegawaian di tingkat nasional dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kebijakan kepegawaian dalam Renstra BKN Tahun 2020-2024 dijabarkan dalam 5 (lima) tujuan yaitu:

1. Mewujudkan Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN yang Berkualitas;
2. Mewujudkan Penyelenggaraan Manajemen ASN Berkualitas Prima;
3. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Database dan Sistem Informasi ASN (SI-ASN);
4. Mewujudkan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan NSPK Manajemen ASN; dan
5. Mewujudkan Tata Kelola Manajemen ASN BKN yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel.

Sasaran strategis yang ingin dicapai BKN adalah:

1. Terwujudnya Instansi Pemerintah yang Profesional dalam menerapkan Manajemen ASN;
2. Manajemen ASN berkualitas prima;
3. Terwujudnya pemenuhan kebijakan teknis manajemen ASN;
4. Terwujudnya peningkatan kualitas Data dan Sistem Informasi ASN;
5. Terwujudnya peningkatan digitalisasi penyelenggaraan layanan Manajemen ASN;
6. Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Manajemen ASN; dan
7. Terwujudnya Manajemen Internal BKN yang Efektif, Efisien dan Akuntabel.



Gambar 3.1.  
Peta Strategi Badan Kepegawaian Negara Tahun 2020-2024

Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang menjadi mitra kerja BKPSDM Kabupaten Balangan yaitu Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM). Sasaran strategis BKD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 adalah:

1. Peningkatan Penerapan Kinerja Individu, dengan indikator Persentase Individu Pegawai dengan Kinerja kategori Baik;
2. Peningkatan penerapan manajemen karir pegawai, dengan indikator Persentase SKPD yang mengidentifikasi kompetensi pegawai; dan
3. Meningkatnya kualitas pelayanan bidang kepegawaian, dengan indikator Indek kepuasan PNS terhadap pelayanan kepegawaian.

Sedangkan sasaran strategis BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan yaitu:

1. Meningkatnya ASN Provinsi Kalimantan Selatan yang berkompeten, dengan indikator Persentase Peningkatan Kompetensi Alumni Diklat Teknis, Manajerial, Latihan Dasar, Fungsional dan Pemerintahan Sesuai Tujuan

Diklat dan Persentase Peserta Diklat yang Memenuhi Standar Kompetensi;  
dan

2. Meningkatnya Kepuasan Pelayanan BPSDM, dengan indikator Indeks Kepuasan Pelayanan BPSDM.

Berdasarkan hasil telaah tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Balangan mempunyai esensi yang sama dengan tujuan dan sasaran strategis Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi. Letak kesamaan dimaksud adalah manajemen ASN, pengembangan SDM aparatur melalui pendidikan dan pelatihan, dan peningkatan kualitas layanan publik. Adapun faktor yang harus diantisipasi, yaitu kondisi Pandemi Covid-19 yang belum dapat diprediksi waktu usainya dan berpotensi menghambat koordinasi antarinstansi.

#### **B. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Tujuan BKPSDM Kabupaten Balangan adalah “Terwujudnya Pegawai ASN yang Profesional”, dengan indikator “Indeks Profesionalitas ASN/Persentase ASN yang profesional”. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah “Meningkatnya Penerapan Sistem Merit”, dengan indikator “Indeks Sistem Merit”. Rincian rencana kinerja tujuan dan sasaran SKPD tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1.  
Rencana Kinerja Tujuan dan Sasaran SKPD pada  
BKPSDM Kabupaten Balangan Tahun 2024

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tahun 2024
1	2	3	4
1.	Terwujudnya Pegawai ASN yang Profesional	Indeks Profesionalitas ASN/Persentase ASN yang profesional	85
1.1.	Meningkatnya Penerapan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	275

### C. Program dan Kegiatan

BKPSDM Kabupaten Balangan pada Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merencanakan 3 (tiga) program, 11 (sebelas) kegiatan, dan 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan. Kebutuhan dana yang menjadi pagu indikatif untuk melaksanakan program, kegiatan, sub kegiatan tersebut adalah sebesar Rp 22.027.672.477,00 (*dua puluh dua miliar dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah*). Adapun rincian program dan kegiatan serta sub kegiatan dan kebutuhan pagu indikatif masing-masing dapat dilihat pada tabel 2.4.

### D. Analisis Sosial Ekonomi

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 tidak berdampak langsung terhadap peningkatan sosial ekonomi, karena tata laksana (*core business*) BKPSDM Kabupaten Balangan adalah manajemen kepegawaian dan pengembangan SDM Aparatur. Jadi pelayanan yang diberikan BKPSDM Kabupaten Balangan bersifat *segmented* kepada ASN, baik yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta tidak terkait dengan pelayanan dasar kepada publik sebagai masyarakat dalam arti luas.

Dengan kata lain, BKPSDM merupakan salah satu lembaga teknis penunjang penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Keluaran, dampak, dan manfaat pada aspek sosial dan ekonomi memang tidak dapat diukur dan dianalisis secara langsung melalui Renja Perangkat Daerah karena alasan sebagaimana telah dikemukakan, tetapi harus diakui bahwa BKPSDM berperan penting dalam pemberian layanan kepegawaian dan pengembangan pengetahuan (*knowledge*), keahlian (*skill*), dan sikap perilaku (*attitude*) sebagai ASN. Sehingga diharapkan aparatur tersebut dapat mempertahankan dan terus meningkatkan kinerjanya secara berkesinambungan serta memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan untuk akselerasi pembangunan daerah dan memberikan pelayanan publik yang prima.

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

#### A. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta masing-masing indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, sebagai bagian Renja Perangkat Daerah Tahun 2024, dan dirumuskan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran BKPSDM Kabupaten Balangan. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta masing-masing indikator tersebut dengan memperhatikan aspek-aspek berikut:

1. Mempedomani RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2024 serta Penyesuaian Renstra Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan. Dalam hal ini, BKPSDM berperan dalam pencapaian tujuan “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik” dan sasaran “Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi”.
3. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
4. Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis pada urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan; dan
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dengan prinsip kepatuhan pada regulasi yang berlaku.

## **B. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal dan Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024, BKPSDM Kabupaten Balangan telah merumuskan 3 (tiga) program, 11 (sebelas) kegiatan, dan 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan. Total pagu indikatif untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 17.630.920.470,00 (*tujuh belas miliar enam ratus tiga puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu empat ratus tujuh puluh rupiah*). Adapun pagu Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp 22.027.672.477,00 (*dua puluh dua miliar dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah*).

Besaran pagu tersebut ditetapkan dengan mencermati perubahan lingkungan dan isu-isu strategis serta dalam rangka akselerasi pencapaian tujuan dan sasaran, baik secara makro sebagaimana tertuang dalam RPJMD dan RKPD maupun level mikro sesuai Penyesuaian Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah. Berikut rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas dan fungsi serta kewenangan BKPSDM Kabupaten Balangan:

### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Program dimaksud dilaksanakan oleh Sekretariat dengan pagu sebesar Rp 9.044.636.277,00, terdiri dari 6 (enam) kegiatan dan 14 (empat belas) sub kegiatan, yaitu:

#### **a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Anggaran untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 108.940.500,00 yang mencakup 3 (tiga) sub kegiatan berikut:

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan pagu anggaran Rp 39.855.500,00.
  - 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan pagu anggaran Rp 42.160.000,00.
  - 3) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, , dengan pagu anggaran Rp 26.925.000,00.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Anggaran untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 6.430.804.077,00 yang mencakup 3 (tiga) sub kegiatan berikut:
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan pagu anggaran Rp 6.328.054.077,00
  - 2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan pagu anggaran Rp 90.750.000,00.
  - 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan pagu anggaran Rp 12.000.000,00.
- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Anggaran untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 532.028.100,00 yang mencakup 3 (tiga) sub kegiatan berikut:
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan pagu anggaran Rp 163.331.800,00.
  - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan pagu anggaran Rp 45.144.000,00.
  - 3) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan pagu anggaran Rp 323.552.300,00.
- d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Anggaran untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 1.102.351.100,00 yang mencakup 1 (satu) sub kegiatan berikut:

1) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan pagu anggaran Rp 1.102.351.100,00

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Anggaran untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 577.050.900,00 yang mencakup 2 (dua) sub kegiatan berikut:

1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan pagu anggaran Rp 212.928.200,00

2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan pagu anggaran Rp 364.122.700,00.

f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 293.461.600,00 yang mencakup 2 (dua) sub kegiatan berikut:

1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan pagu anggaran Rp 169.461.600,00.

2) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan pagu anggaran Rp 124.000.000,00.

## 2. Program Kepegawaian Daerah

Program dimaksud dilaksanakan oleh Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi Kepegawaian, Mutasi dan Promosi ASN, Bidang Pembinaan, Kesejahteraan, Penilaian dan Evaluasi Kinerja ASN, dan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan pagu sebesar Rp 9.046.360.300,00, terdiri dari 4 (empat) kegiatan dan 16 (enam belas) sub kegiatan, yaitu:

- a. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN  
Anggaran untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 486.949.900,00 yang mencakup 4 (empat) sub kegiatan berikut:
- 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK, dengan pagu anggaran Rp 140.639.000,00.
  - 2) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian, dengan pagu anggaran Rp 74.726.000,00.
  - 3) Sub Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN, dengan pagu anggaran Rp 90.379.400,00.
  - 4) Sub Kegiatan Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian, dengan pagu anggaran Rp 181.205.500,00.
- b. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN  
Anggaran untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 298.240.400,00 yang mencakup 2 (dua) sub kegiatan berikut:
- 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN, dengan pagu anggaran Rp 91.828.600,00.
  - 2) Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN, dengan pagu anggaran Rp 206.411.800,00.
- c. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN  
Anggaran untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 7.361.027.800,00 yang mencakup 5 (lima) sub kegiatan berikut:
- 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Assessment Center, dengan pagu anggaran Rp 1.693.829.900,00.
  - 2) Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN, dengan pagu anggaran Rp 2.496.055.600,00.
  - 3) Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN, dengan pagu anggaran Rp 1.538.980.000,00.
  - 4) Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN, dengan pagu anggaran Rp 370.760.500,00.

- 5) Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN, dengan pagu anggaran Rp 1.261.401.800,00.
- d. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
- Anggaran untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 900.142.200,00 yang mencakup 5 (lima) sub kegiatan berikut:
- 1) Sub Kegiatan Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, dengan pagu anggaran Rp 573.610.000,00.
  - 2) Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai, dengan pagu anggaran Rp 115.043.200,00.
  - 3) Sub Kegiatan Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai, dengan pagu anggaran Rp 68.016.000,00.
  - 4) Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN, dengan pagu anggaran Rp 72.333.000,00.
  - 5) Sub Kegiatan Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai, dengan pagu anggaran Rp 71.140.000,00.
3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
- Program dimaksud dilaksanakan oleh Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan pagu sebesar Rp 3.936.675.900, mencakup hanya 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:
- a. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
- Anggaran untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 3.936.675.900,00 yang mencakup 1 (satu) sub kegiatan berikut:
- 1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan, dengan pagu anggaran Rp 3.936.675.900,00.



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/S UB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN						RENCANA TAHUN 2024										PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025						
		Capaian Program (sesuai Renstra PD sebelum Penyesuaian)	Capaian Program (sesuai Penyesuaian Renstra PD)	Hasil Kegiatan (sesuai Renstra PD sebelum Penyesuaian)	Hasil Kegiatan (sesuai Penyesuaian Renstra PD)	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Opuput Kegiatan	Target Capaian Kinerja										CATATAN PENTING	Target Capaian Kinerja		KET.			
								Program (sesuai Renstra PD sebelum Penyesuaian)		Program (sesuai Penyesuaian Renstra PD)		Hasil Kegiatan (sesuai Renstra PD sebelum Penyesuaian)		Hasil Kegiatan (sesuai Penyesuaian Renstra PD)		Keluaran Sub Kegiatan			Pagu Indikatif	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif
								Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
5 03 01 206	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum sesuai ketentuan berlaku	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Baik					100	%	100	%			532.028.100	-	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum sesuai ketentuan berlaku	100	604.207.080				
5 03 01 206 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Balangan					5	Paket	163.331.800	APBD	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	174.779.190					
5 03 01 206 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Balangan					36	Dokumen	45.144.000	APBD	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36	47.702.390					
5 03 01 206 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Balangan					100	Laporan	323.552.300	APBD	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	381.725.500					
5 03 01 207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai RKBU	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah sesuai ketentuan					100	%	100	%			1.102.351.100	-	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai RKBU	100	386.207.835				
5 03 01 207 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Balangan					15	Unit	1.102.351.100	APBD	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15	386.207.835					
5 03 01 208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Baik					12	Bulan	100	%			577.050.900	-	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	522.424.280				
5 03 01 208 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Balangan					12	Laporan	212.928.200	APBD	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	195.000.000					
5 03 01 208 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Balangan					12	Laporan	364.122.700	APBD	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	327.424.280					
5 03 01 209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Baik					12	Bulan	100	%			293.461.600	-	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	424.909.895				
5 03 01 209 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Balangan					20	Unit	169.461.600	APBD	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20	131.641.895					
5 03 01 209 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Balangan					1	unit	124.000.000	APBD	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	293.268.000					

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/S UB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN						RENCANA TAHUN 2024										PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025						
		Capaian Program (sesuai Renstra PD sebelum Penyesuaian)	Capaian Program (sesuai Penyesuaian Renstra PD)	Hasil Kegiatan (sesuai Renstra PD sebelum Penyesuaian)	Hasil Kegiatan (sesuai Penyesuaian Renstra PD)	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Ouput Kegiatan	Target Capaian Kinerja										Pagu Indikatif	Sumber Dana	CATATAN PENTING	Target Capaian Kinerja		KET.	
								Program (sesuai Renstra PD sebelum Penyesuaian)		Program (sesuai Penyesuaian Renstra PD)		Hasil Kegiatan (sesuai Renstra PD sebelum Penyesuaian)		Hasil Kegiatan (sesuai Penyesuaian Renstra PD)		Keluaran Sub Kegiatan					Pagu Indikatif	Target		Pagu Indikatif
								Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
5	03	02						100	%	40	%						9.046.360.300	-		Persentase tata kelola dan layanan kepegawaian sesuai sistem dan prosedur berlaku	60	9.604.987.030		
5	03	02	201		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN					65	%	57	%				486.949.900	-		Persentase pemenuhan pegawai berdasarkan ABK	59	538.353.635		
										100	%													
5	03	02	201	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK									1	Dokumen	140.639.000	APBD	-		Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1	179.464.950		
5	03	02	201	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian									1	Dokumen	74.726.000	APBD	-		Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1	74.938.500		
5	03	02	201	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN									1	Lembaga	90.379.400	APBD	-		Jumlah Lembaga Profesi ASN yang difasilitasi	1	94.905.940		
5	03	02	201	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian									1	Laporan	181.205.500	APBD	-		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1	189.044.245		
5	03	02	202		Mutasi dan Promosi ASN					100	%	100	%				298.240.400	-		Persentase jabatan pimpinan tinggi, administrasi, fungsional yang terisi	100	215.175.430		
										100	%	34	%							Persentase SK Kenaikan Pangkat yang terbit tiap periode	35			
5	03	02	202	01	Pengelolaan Mutasi ASN									1	Dokumen	91.828.600	APBD	-		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1	97.448.200		
5	03	02	202	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN									2	Dokumen	206.411.800	APBD	-		Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2	117.727.230		
5	03	02	203		Pengembangan Kompetensi ASN					40	%	27	%				7.361.027.800	-		Persentase ASN yang memperoleh sertifikat kompetensi teknis dan fungsional (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	32	8.304.492.545		



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/S UB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN					RENCANA TAHUN 2024										PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025			KET.				
		Capaian Program (sesuai Renstra PD sebelum Penyesuaian)	Capaian Program (sesuai Penyesuaian Renstra PD)	Hasil Kegiatan (sesuai Renstra PD sebelum Penyesuaian)	Hasil Kegiatan (sesuai Penyesuaian Renstra PD)	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Ouput Kegiatan	Target Capaian Kinerja										Pagu Indikatif	Sumber Dana		CATATAN PENTING	Target Capaian Kinerja		
								Program (sesuai Renstra PD sebelum Penyesuaian)		Program (sesuai Penyesuaian Renstra PD)		Hasil Kegiatan (sesuai Renstra PD sebelum Penyesuaian)		Hasil Kegiatan (sesuai Penyesuaian Renstra PD)		Keluaran Sub Kegiatan						Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif
								Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
5	04	02	202	07	Prajabatan/Pelatihan Dasar									2	Laporan	3.936.675.900	APBD	-	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2	3.179.216.875			

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dokumen Renja Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Balangan Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Penyusunan dokumen perencanaan tersebut berpedoman pada RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaan yang dibutuhkan. Nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan pada dokumen Renja didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan dimaksud dalam perkembangannya telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021.

Proses penyusunan Renja telah melalui tahapan yang dipersyaratkan dan menggunakan pendekatan partisipatif dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait. Sehingga keberhasilan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 menjadi tanggung jawab seluruh pihak yang ada pada BKPSDM Kabupaten Balangan. Dengan demikian, Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman dasar dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD BKPSDM. RKA SKPD tersebut selanjutnya akan dijadikan acuan pengelolaan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Oleh karena itu, dibutuhkan adanya kesepahaman dan penetapan kaidah-kaidah penjabaran Renja yang terdiri dari:

1. Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan pedoman dalam penyusunan RKA SKPD BKPSDM Kabupaten Balangan Tahun 2024 yang memuat indikator, tolok ukur kinerja, target kinerja, kode rekening, uraian belanja per rekening, rincian perhitungan, dan jumlah anggaran Tahun 2024. RKA tersebut selanjutnya akan ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD sebagai

dokumen acuan dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun anggaran 2024;

2. Pimpinan dan pihak-pihak terkait pada BKPSDM agar melakukan monitoring pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta anggaran yang direncanakan serta mengambil tindakan korektif yang dibutuhkan dalam rangka menjaga efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan dimaksud; dan
3. Pimpinan dan pihak-pihak terkait pada BKPSDM Kabupaten Balangan melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada akhir tahun anggaran 2024 sebagai bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang mempedomani ketentuan peraturan perundangan berlaku.

Keberadaan Renja Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Balangan Tahun 2023 diharapkan dapat membuat pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah serta target program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi lebih fokus, terarah, dan terintegrasi. Sehingga bisa memberikan dampak positif terhadap kelompok yang menjadi sasaran program, kegiatan, dan sub kegiatan serta bagi pengguna layanan BKPSDM. Di samping itu, pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan harus tetap berpegang teguh pada prinsip efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Paringin, Agustus 2023

Kepala Badan,



**H. SUFRIANNOR, S.Sos, M.AP**

Pembina Utama Muda

NIP. 19681012 198903 1 009